

PERAN PEMERINTAH DALAM PENATAAN DAN PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI DI TERMINAL TIPE B BARUGA KENDARI

Ridwansyah Nuhun^{1*}, Try Sugiyarto Soeparyanto², La Ode Muhamad Nurrahmad Arsyad³,
Rezki Fidmasari⁴, Maudhy Satyadharma⁵

¹²³⁴Program Studi Manajemen Rekayasa, Universitas Halu Oleo

⁵Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara

*Email : ridwansyah.nuhun@uho.ac.id

Abstract

This research aims to analyze the role that local governments should play in organizing transportation, especially in the arrangement, development and implementation of transportation operations in the Baruga Kendari Type B Passenger Terminal area. This research focuses on the role that the government should play in organizing the Baruga Kendari Type B Passenger Terminal. Data collection was carried out through interviews with relevant stakeholders at the Baruga Kendari Type B Passenger Terminal who were deemed to understand the issues raised. The results of the research found that the Southeast Sulawesi Provincial Government through the Department of Transportation has carried out roles in the implementation of land transportation, especially in the arrangement, development and implementation of operationalization in the Baruga Kendari Type B Passenger Terminal area in order to encourage the implementation of safe, comfortable, humane and sustainable transportation.

Key Words : *Transportation, Terminal, The Role Of Local Government*

1. PENDAHULUAN

Permasalahan transportasi atau permasalahan aksesibilitas dan mobilitas terjadi hampir di setiap kota besar di dunia. Aksesibilitas mengacu pada jarak perjalanan dan waktu perjalanan, sedangkan mobilitas mengacu pada kemampuan untuk berpindah antar lokasi yang berbeda (Farda & Lubis, 2018).

Permasalahan yang disebutkan diatas bisa terjadi karena beberapa unsur diantaranya terbatasnya sarana dan prasarana pendukung transportasi, laju urbanisasi yang meningkat pesat, banyaknya pengemudi *shuttle*, dan sistem perencanaan transportasi yang belum memadai. Kondisi ini menyebabkan kemacetan lalu lintas, kecelakaan,

permasalahan lingkungan, dan berdampak pada kesehatan masyarakat di perkotaan (Hasina & Satyadharma, 2023).

Padahal patut diyakini bahwa peranan vital ditunjukkan oleh sektor transportasi yang menggerakkan mobilitas masyarakat (Sutedi, 2011). Selain itu, sarana dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi yang mampu mempengaruhi aspek lain dalam kehidupan bangsa dan Negara serta mendorong semakin kukuhnya persatuan bangsa juga dijalankan oleh sektor transportasi karena kemampuan sektor ini untuk menunjang dan menggerakkan pertumbuhan ekonomi di daerah yang berkembang (Kartini, 2007).

Kendari sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara, tentu sedang mengalami pertumbuhan penduduk yang jika tidak

diantisipasi akan menimbulkan permasalahan di beberapa sektor, termasuk transportasi. Selanjutnya dalam semangat otonomi daerah, setiap pemerintah daerah diberikan kebebasan untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri, berdasarkan prakarsa, kreativitas, dan partisipasi aktif masyarakat, demi pembangunan dan kemajuan daerahnya (Koswara, 2001).

Salah satu simpul transportasi yang sering menjadi sumber permasalahan transportasi adalah Terminal Penumpang. Penelitian yang memfokuskan mengenai cara dan strategi dalam meningkatkan fungsi dan peran terminal telah dilakukan Hasina & Satyadharma (2023) dalam rangka mengembalikan fungsi terminal secara optimal.

Hasil observasi penulis dapat dikatakan bahwa kondisi fasilitas Terminal Penumpang Tipe B Baruga Kota Kendari ini belum sesuai dengan standar terminal Tipe B yang mengacu pada aturan berlaku. Sirkulasi parkir masih cenderung belum teratur. Selain perhatian yang minim pada penyediaan sarana prasarana terminal, maraknya Terminal Bayangan dan eksistensi Kendaraan Online yang langsung mengambil penumpang langsung dari rumah ke rumah membuat Terminal Tipe B kehilangan fungsi sebagaimana yang diharapkan (Farida et al., 2022; Hasina & Satyadharma, 2023; Wibowo, 2020).

Hasil observasi ditemukan masih ada beberapa sarana prasarana minimal yang harus disiapkan dalam suatu Terminal Penumpang Tipe B masih belum ada dan atau belum layak sehingga membuat banyak calon pengguna jasa agak malas untuk ke Terminal untuk menggunakan moda transportasi umum, dan lebih sering minta dijemput langsung di rumah masing-masing oleh angkutan antar kota tersebut. Selain itu masih banyak terminal yang ada mengalami berbagai permasalahan terkait keterbatasan anggaran dalam revitalisasi dan rehabilitasi sehingga banyak sekali sarana prasarana yang menjadi tidak

optimal ketika kewenangan penyelenggaraan sebagian aspek termasuk transportasi dilimpahkan kepada Pemprov dan Pemkab/Pemkot (Hasina & Satyadharma, 2023).

Peranan pemerintah seperti yang dikemukakan oleh Siagian (2009) pada umumnya muncul dalam berbagai bentuk seperti fungsi untuk mengatur, fungsi untuk merumuskan berbagai jenis kebijaksanaan, fungsi untuk melayani, fungsi dalam menegakkan hukum, serta fungsi untuk memelihara ketertiban umum dan keamanan.

Arif (Nurdin, 2014) menyatakan beberapa peran yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mendorong kesejahteraan masyarakat dan pemercepatan pembangunan diantaranya:

1. Peran pemerintah sebagai regulator.
2. Peran pemerintah sebagai dinamisator.
3. Peran pemerintah sebagai fasilitator.
4. Peran pemerintah sebagai katalisator (Firdaus, 2020).

2. METODOLOGI

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif (Sugiyono, 2018). Penelitian ini memfokuskan pada peran yang seharusnya dilaksanakan pemerintah dalam penyelenggaraan Terminal Penumpang Tipe B Baruga Kendari terutama dalam kaitan dengan Otonomi daerah sehingga mampu mendukung penyelenggaraan transportasi yang optimal di Terminal Baruga. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara pada stakeholder terkait pada Terminal Penumpang Tipe B Baruga Kendari yang dianggap memahami persoalan yang diangkat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Para Informan penelitian meyakini bahwa pengembangan sarana transportasi darat

sebagai bagian dari rencana besar pemerintah dalam membangun sistem transportasi berkelanjutan yang berdampak pada banyak hal baik itu mendorong mobilitas orang dan jasa, mendorong pertumbuhan ekonomi maupun berdampak pada pengembangan wilayah (Fitriyadi, 2017; Hasina & Satyadharna, 2023). Hal itu juga termasuk dalam penataan dan pengelolaan Terminal sebagai salah satu simpul transportasi yang ada yang berimplikasi pada banyak aspek kehidupan manusia.

Terminal Penumpang Tipe B Baruga Kendari merupakan salah satu Terminal yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.



Gambar 1. Terminal Tipe B Baruga Kota Kendari Dari Udara

Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai bagian dari pemerintah daerah sudah melaksanakan peran-peran yang harus dijalankan suatu institusi pemerintah dalam mengoptimalkan terminal penumpang tipe B Baruga Kendari yang akan diuraikan sebagai berikut:

Peran Sebagai Regulator

Hasil wawancara memperlihatkan bahwa Pemda Sulawesi Tenggara sudah berperan sebagai regulator dalam hal menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan terminal sebagai salah satu simpul transportasi yang ada. Peran itu termasuk menerbitkan peraturan daerah dalam hal pengaturan transportasi maupun menerapkan peraturan lainnya.

Hasil wawancara pada para informan juga mengakui bahwa fasilitas yang ada di terminal tidak memadai sehingga perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menggelontorkan anggaran untuk tambahan perbaikan fasilitas dan sarana prasarana yang ada sehingga berdampak pada aspek ekonomi dan sosial, yang sejalan dengan temuan penelitian (Asana et al., 2024).

Dalam kaitan dengan aspek transportasi maka pelayanan berkualitas harus dilakukan dalam implementasi standar dan kebijakan regulasi transportasi sehingga akan mendukung mobilitas penduduk, produktivitas sumber daya daerah yang ada serta mendorong pertumbuhan ekonomi (Soeparyanto et al., 2023). Keterkaitan antara keterbatasan anggaran tersebut mungkin bisa diatasi dengan skema *Collaborative Governance* yang merupakan perwujudan kerjasama dan kolaborasi antar instansi pemerintah maupun dengan lembaga swasta sehingga penyiapan sarana dan prasarana di terminal yang layak dan memadai menjadi suatu urgensi sehingga mampu mendorong peningkatan pelayanan optimal kepada publik (Akbar, 2021;; Wibowo, 2020).

Peran Sebagai Dinamisator

Peran tersebut dilakukan oleh Dinas Perhubungan Sultra yang menasar pihak swasta dan masyarakat serta operator transportasi seperti Perum Damri.

Untuk memperlancar berfungsinya Terminal Tipe B Baruga, maka kehadiran dan partisipasi masyarakat dan swasta akan sangat bermanfaat. Hal itu sejalan juga dengan temuan penelitian Herman (2011) yang menyatakan pentingnya partisipasi masyarakat dalam mendorong sistem transportasi berkelanjutan.

Peran Sebagai Fasilitator

Hasil wawancara pada para informan menyatakan bahwa Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara sudah berperan

dan berfungsi sebagai fasilitator dalam rangka menciptakan situasi dan kondisi lingkungan secara kondusif. Situasi dan kondisi lingkungan yang tertib dan kondusif merupakan bukti bahwa peran sebagai fasilitator sudah dijalankan dengan baik.

Peran Sebagai Motivator

Hasil wawancara pada para informan penelitian juga menyatakan sudah kerasnya upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam mendorong peran aktif masyarakat setempat sehingga mampu mendukung mobilitas pergerakan orang, mendukung pengembangan wilayah serta diharapkan akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Temuan penelitian menyimpulkan bahwa Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara sudah menjalankan peran-peran yang seharusnya dijalankan dalam rangka mendorong penyelenggaraan transportasi khususnya di terminal berjalan dengan optimal sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Siagian (2009). Hal ini harus dilakukan terkait semakin signifikannya sektor transportasi bagi pembangunan ekonomi suatu negara dan kawasan (Hasina & Satyadharma, 2023).

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Dinas Perhubungan sudah menjalankan peran-peran dalam penyelenggaraan transportasi darat khususnya dalam pengembangan di kawasan Terminal Tipe B Baruga Kendari.

REFERENSI

- Akbar, A. A. (2021). Collaborative Governance untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Transportasi di Kota Makassar. Universitas Hasanuddin.
- Asana, A. R., Sari, M., Siolimbona, I., & Satyadharma, M. (2024). Kebutuhan Internet of Things dalam meningkatkan pelayanan di Terminal Tipe B Baruga Kendari. *Jurnal Teknik Sipil ITP*, 11(1), 65–69. <https://doi.org/10.21063/JTS.2024.V1101.065-69>
- Farda, M., & Lubis, H. (2018). *Transportation System Development and Challenge in Jakarta Metropolitan Area, Indonesia*. *International Journal of Sustainable Transportation Technology*, 1(2), 42–50. <https://doi.org/10.31427/ijstt.2018.1.2.2>
- Farida, I., Sidik, R. T. P., & Zhafirah, A. (2022). Evaluasi Penataan Terminal Angkutan Darat Pameungpeuk Kabupaten Garut. *Akselerasi : Jurnal Ilmiah Teknik Sipil*, 3(2). <https://doi.org/10.37058/aks.v3i2.4584>
- Firdaus, R. (2020). Peran Pemerintah Daerah Sebagai Regulator, Dinamisator, Fasilitator, Dan Katalisator Dalam Pemberdayaan Petani Kakao Di Kabupaten Luwu Utara. *Publik Administrasi*, 3(1), 32–40.
- Fitriyadi, F. (2017). Peran Terminal Seruni Dalam Sistem Transportasi Perkotaan Kota Cilegon. *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 12(4), 373. <https://doi.org/10.14710/pwk.v12i4.13504>
- Hasina, H., & Satyadharma, M. (2023). Strategi Pengembangan Fungsi Terminal Penumpang Tipe B Di Provinsi Sulawesi Tenggara. *Journal Publicuho*, 6(1), 246–256. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.112>
- Herman. (2011). Indikator Partisipasi Masyarakat dalam Sistem Transportasi Berkelanjutan. *Jurnal Transportasi*, 11(1), 39–51. <https://doi.org/10.30871/jaemb.v6i2.903>
- Kartini, R. (2007). Hukum Pengangkutan. UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang.
- Koswara, E. . (2001). Otonomi Daerah untuk Demokrasi dan Pemberdayaan. Yayasan Pariba.
- Nurdin, M. (2014). Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Jagung di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Siagian, S. P. (2009). *Administrasi Pembangunan*. Bumi Aksara.
- Soeparyanto, T. S., Statiswaty, Arsyad, L. O. M. N., & Masikki, S. M. H. (2023). Kinerja Angkutan Umum Penumpang Perkotaan di Kota Kendari. *Jurnal Transportasi*, 23(2), 93–102.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sutedi, A. (2011). Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik. Sinar Grafika.
- Wahyuni, R. S. (2018). Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Rumah Kost di Kecamatan Rappocini

Kota Makassar (Studi Kasus Lima Rumah Kost di Kelurahan Gunung Sari). Universitas Muhammadiyah Makassar.

Wibowo, A. N. F. (2020). Collaborative Governance dalam pelayanan Transportasi Publik (Studi BRT Trans Semarang). *Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(3).